



Bagian / Panduan	Perubahan dari versi sebelumnya	Alasan
Umum	<ul style="list-style-type: none"> Mengubah terminologi dari “fasilitas penampungan tailing” menjadi “fasilitas pembuangan tailing.” 	Penggunaan kata “penampungan” menyiratkan penempatan tailing sementara dan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta bahwa tailing adalah bahan limbah.
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> Menghapus referensi pada versi draf Standar Industri Global tentang Pengelolaan Tailing (<i>GISTM — Global Industry Standard on Tailings Management</i>). Memperbaiki pembahasan dengan maksud memperjelas makna dan pembaca tentang dokumen. Memperbaiki pembahasan seputar peran pembuat peraturan dan perlunya transparansi dalam pengelolaan tailing. 	<p>Versi final GISTM dirilis pada Agustus 2020.</p> <p>Dokumen ini dimaksudkan sebagai alat dan sumber daya bagi masyarakat yang terkena dampak pertambangan dan organisasi tempat mereka bekerja. Secara khusus, penulis berharap bahwa dokumen ini memberikan sudut pandang bagi masyarakat tentang pengelolaan tailing dan memberdayakan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pengelolaan tailing.</p> <p>Ada umpan balik yang bisa dikatakan universal selama sesi penyampaian komentar bahwa pembuat peraturan tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi keselamatan publik terkait dengan pembuangan tailing. Pembahasan yang baru mencoba menggarisbawahi perlunya perbaikan regulasi, transparansi dan pengawasan, sementara mengakui kekurangan sistem regulasi saat ini.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan deskripsi proses untuk memperbarui Safety First. 	Memberi informasi kepada pembaca tentang perubahan apa saja yang telah dibuat pada versi yang baru dan berterima kasih kepada peserta dan komentator atas umpan balik mereka.
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan tahap-tahap pengelolaan tailing untuk menunjukkan bagaimana kita dapat mengurangi jumlah keseluruhan tailing yang dihasilkan. 	Penyimpanan tailing di atas tanah harus menjadi upaya terakhir, dan langkah-langkah, seperti pengurangan permintaan mineral dan daur ulang mineral, harus dilakukan untuk mengurangi jumlah tailing yang dihasilkan.
Cakupan	<ul style="list-style-type: none"> Memperluas cakupan deskripsi dampak lingkungan hidup kronis dari pembuangan tailing, dan memberikan contoh yang spesifik. 	Untuk menanggapi keprihatinan yang mengemuka selama proses konsultasi, Ada satu bagian pembahasan baru yang menanggapi keprihatinan yang mendalam terkait kesehatan lingkungan dan orang-orang dalam komunitas yang tinggal berdekatan dengan tailing yang perlahan-lahan atau dalam jangka waktu lama mengalami kegagalan.

Bagian / Panduan	Perubahan dari versi sebelumnya	Alasan
	<ul style="list-style-type: none"> Menambah kejelasan tentang jenis struktur rekayasa apa yang termasuk dalam panduan ini. 	<p>Pengelola tambang menggunakan berbagai kosakata untuk menggambarkan fasilitas pembuangan limbah mereka. Seringkali mereka akan menghindari atau menghilangkan penggunaan kata “bendungan,” terutama dalam hal fasilitas tailing yang disaring. Safety First ditujukan untuk setiap struktur teknik yang menyimpan tailing tambang, terlepas dari terminologi yang digunakan oleh pengelola tambang.</p>
<p>1. Jadikan keselamatan sebagai prinsip panduan dalam desain, konstruksi, operasi, dan penutupan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memperluas cakupan definisi keselamatan agar dapat memasukkan kesehatan sumber daya ekologis dan ekosistem yang rapuh ke dalam definisi tentang keselamatan manusia. 	<p>Selama proses konsultasi, perwakilan masyarakat dan LSM memberikan umpan balik bahwa penting untuk mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan lingkungan alam kita sebagai perpanjangan dari kesehatan dan keselamatan manusia. Ini lebih mencerminkan hubungan timbal balik dan saling bergantung antara orang dengan lingkungan alam mereka.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Mengubah frasa “Tujuan akhir pengelolaan tailing harus tidak menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan” menjadi tujuan toleransi nol terhadap kematian dan kerugian manusia, dan tujuan untuk membatasi kerusakan lingkungan secara keseluruhan, tetapi khususnya hanya pada lokasi tambang. 	<p>Selama proses revisi, para ahli teknis, masyarakat dan perwakilan LSM menekankan bahwa kerugian nol adalah tujuan yang tidak dapat dicapai, karena pertambangan akan selalu menimbulkan beberapa dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Pembahasan tujuan ini diubah untuk menghadirkan tujuan yang dapat dicapai tetapi tetap mementingkan keselamatan manusia dan lingkungan hidup agar terealisasi di atas segalanya.</p>
<p>2. Persetujuan dari komunitas yang terkena dampak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembahasan untuk memperjelas bahwa persetujuan berarti “hak untuk mengatakan ya, hak untuk mengatakan tidak, atau hak untuk mengatakan ya dengan syarat.” 	<p>Selama proses konsultasi, tim penulis mendengar bahwa pengelola tambang telah salah kaprah atau salah mengartikan proses konsultasi sebagai persetujuan. Pembahasan yang diperbarui mencoba untuk mengklarifikasi bahwa komunitas dan Penduduk Asli harus memiliki hak untuk menolak suatu proyek.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan bahwa komunitas harus dapat menentukan format dan siapa yang berpartisipasi dalam proses konsultasi persetujuan. Pengelola tambang harus memberikan studi dampak terlebih dahulu untuk digunakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mereka, dan mereka juga harus menyediakan akses ke pakar hukum dan teknis selama proses berlangsung. 	<p>Melindungi hak masyarakat yang terkena dampak sehingga memiliki proses konsultasi yang terinformasi, dan untuk menentukan parameter proses konsultasi. Ini juga bertujuan untuk menghilangkan campur tangan dalam mekanisme konsultasi oleh pemerintah atau pengelola tambang.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Mengklarifikasi mengapa PADIATAPA adalah hak bagi Masyarakat Adat berdasarkan tempat tinggal dan pengelolaan atas tanah mereka sebelum penjajahan. 	<p>Penulis ingin mengakui preseden PADIATAPA untuk Masyarakat Adat.</p>

Bagian / Panduan	Perubahan dari versi sebelumnya	Alasan
3. Melarang fasilitas tailing baru di mana daerah berpenghuni berada di jalur kegagalan tailing	<ul style="list-style-type: none"> Mengubah bahasa "larangan fasilitas tailing baru yang dibangun persis di daerah hulu daerah berpenghuni" menjadi "larangan fasilitas tailing baru di mana daerah berpenduduk berada di jalur kegagalan bendungan tailing." 	Memperluas kawasan yang dilindungi di bawah panduan ini dan lebih mencerminkan fakta bahwa bukan hanya masyarakat hilir yang berisiko jika terjadi kegagalan tailing.
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan hak masyarakat yang terkena dampak untuk menentukan zona larangan bepergian, dan memperluas panduan untuk mempertimbangkan keselamatan manusia dan sumber daya ekologi dan budaya. 	Memberikan lebih banyak hak kepada masyarakat yang terkena dampak dalam membatasi zona larangan untuk menambang dan melindungi area sensitif.
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan bahwa tailing tidak boleh diendapkan di badan air, seperti sungai, kali, lautan, dll. 	Menekankan pentingnya larangan pembuangan tailing melalui air.
4. Pelarangan terhadap bendungan hulu di tambang baru dan penutupan fasilitas yang ada	<ul style="list-style-type: none"> Ditambahkan bahwa zona struktural tidak boleh dibangun di atas tailing yang tidak dipadatkan atau dipadatkan secara ringan. 	Ini akan menjadi bendungan hulu dan dengan demikian akan dilarang.
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembahasan klarifikasi tentang konsep "centerline yang dimodifikasi" untuk menetapkan bahwa konstruksi ini dianggap sebagai bendungan hulu. 	Pengelola tambang telah menggunakan konsep "centerline yang dimodifikasi" untuk tidak mematuhi larangan terhadap bendungan hulu.
5. Potensi hilangnya nyawa adalah peristiwa ekstrem dan desain harus merespon dengan tepat	<ul style="list-style-type: none"> Sedikit perubahan yang dibuat. 	
6. Mengamankan penggunaan Teknologi Terbaik yang Tersedia untuk tailing, khususnya tailing yang disaring	<ul style="list-style-type: none"> Mengklarifikasi bahwa tailing yang disaring masih membutuhkan bendungan dan oleh karena itu harus dirancang, dibangun dan dipelihara sesuai dengan standar keamanan bendungan tailing. 	Memastikan bahwa pengelola tambang tidak mencoba untuk menghindari penerapan standar keselamatan dengan mengklaim bahwa fasilitas tailing yang disaring bukanlah bendungan tailing.
	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk rincian tambahan pada rekomendasi Laporan Gunung Polley tentang penggunaan tailing yang disaring untuk penahan tailing yang ada, untuk fasilitas tailing baru dan untuk penutupan. 	Memperjelas konsep Teknologi Terbaik yang Tersedia sebagaimana ditentukan dalam Laporan Mt. Polley.
7. Terapkan kontrol yang ketat untuk keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyoroti beberapa masalah terkait ketergantungan yang berlebihan pada Faktor Keamanan, dan menambahkan detail seputar kemungkinan kegagalan tahunan. 	Agar tidak meremehkan penggunaan Faktor Keamanan (FoS), dan untuk memberikan lebih banyak perlindungan untuk mengatasi keterbatasan perhitungan Faktor Keamanan.

Bagian / Panduan	Perubahan dari versi sebelumnya	Alasan
8. Pastikan evaluasi rinci dari fondasi bendungan dan properti tailing	<ul style="list-style-type: none"> Ditambahkan bahwa zona struktural tidak boleh termasuk tailing kontraktif dan rapuh, dan bahwa semua tailing harus diuji untuk benar-benar tidak rapuh. 	Tailing yang rapuh lebih rentan terhadap kegagalan karena perembesan.
9. Sistem pemantauan yang tepat harus tersedia untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada perubahan besar yang dilakukan. 	
10. Pastikan independensi Peninjau untuk memastikan keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> Panduan yang diperluas untuk Badan Peninjau Tailing Independen (<i>ITRB – Independent Tailings Review Board</i>) mencakup: mandat untuk melindungi manusia dan lingkungan, kewajiban untuk menerima informasi pihak ketiga dari pelapor dan masyarakat sipil, dan kebutuhan peninjau untuk memberikan pernyataan tentang hubungan mereka di masa lalu dan sekarang dengan klien atau pihak komisioning. 	Menjamin independensi dan transparansi Badan Peninjau Tailing Independen.
	<ul style="list-style-type: none"> Ditambahkan bahwa kompetensi peninjau harus mencakup kemampuan yang ditunjukkan untuk terlibat dengan masyarakat pedesaan dan adat dengan cara yang memadai. 	Karena masyarakat pedesaan dan masyarakat adat adalah yang paling sering terkena dampak kegiatan pertambangan, peninjau harus menunjukkan keterampilan dan pengalaman terlibat dengan masyarakat ini.
	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan direvisi untuk menyatakan bahwa laporan BRTI dan tanggapan selanjutnya dari pengelola tambang harus diberikan kepada badan pengatur setempat dan setiap masyarakat yang dapat terkena dampak fasilitas tailing. 	Versi asli panduan ini tidak memerlukan transparansi yang sama dengan laporan BRTI.
11. Mengusahakan penutupan yang lebih aman tanpa ancaman kegagalan yang nyata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembahasan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk setiap fasilitas pembuangan tailing. 	Penting bagi pembuat peraturan dan masyarakat untuk memiliki akses ke data dalam AMDAL untuk membuat keputusan yang tepat tentang fasilitas pembuangan tailing.
11. Mengusahakan penutupan yang lebih aman tanpa ancaman kegagalan yang nyata	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan klarifikasi bahwa tanpa pemantauan, inspeksi, dan pemeliharaan terus-menerus, kegagalan tidak dapat dihindari. Jika badan pengatur tidak percaya bahwa pengelola tambang dapat melaksanakan pemeliharaan terus-menerus dan tanggung jawab keuangan seterusnya, fasilitas tersebut tidak boleh dibangun. Pada saat penutupan, fasilitas harus berada dalam kondisi keamanan maksimum, yaitu, menghilangkan semua ancaman kegagalan yang nyata, meskipun harus diakui bahwa fasilitas tidak akan tetap dalam keadaan seperti itu tanpa pemantauan, inspeksi, dan pemeliharaan. 	Memperjelas beberapa kontradiksi dan ketegangan yang melekat dalam penutupan fasilitas tailing. Meskipun ada langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan operator untuk menutup fasilitas tailing dengan lebih aman, kegagalan tidak dapat dihindari tanpa inspeksi, pemeliharaan, dan pemantauan terus-menerus.

Bagian / Panduan	Perubahan dari versi sebelumnya	Alasan
12. Mengatasi risiko keuangan, termasuk keamanan untuk penutupan situs dan asuransi yang tepat untuk tumpahan yang tidak disengaja	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan bahwa pengelola tambang tidak boleh menyatakan pailit atau menjual kepada perusahaan lain untuk menghindari pemantauan penutupan dan kewajiban. 	Selama proses konsultasi, tim penulis mendengar bahwa di banyak yurisdiksi, pengelola tambang berusaha menghindari kewajiban jangka panjang dengan cara menjual atau menyatakan bangkrut.
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan rincian industri dan badan pengatur yang memerlukan asuransi kewajiban umum yang komprehensif untuk mengantisipasi kejadian yang tidak disengaja. 	Untuk menunjukkan persyaratan asuransi pada yurisdiksi dan industri tertentu sebagai percontohan untuk fasilitas pembuangan tailing.
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan bahwa jaminan keuangan berlaku selama minimal 300 tahun dan harus mencakup perkiraan inflasi, kecuali jika diperbarui setiap tahun. 	Memberikan panduan yang lebih baik dan parameter yang lebih protektif sebagai persyaratan jaminan keuangan.
13. Prosedur pengaduan dan pelapor	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan contoh tindakan remedi terkait keluhan. Ditetapkan bahwa pengelola tambang harus memublikasikan keluhan dan resolusi mereka setiap tahun dan harus ada kerangka waktu yang jelas untuk menyelesaikan keluhan, dan komunikasi reguler dengan pelapor selama proses berlangsung. 	Memberikan panduan yang lebih spesifik tentang prosedur pengaduan dan hak-hak pelapor selama proses pengaduan untuk membuat panduan lebih praktis.
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan produsen dan bisnis pertanian ke dalam daftar pemangku kepentingan yang harus dikonsultasikan selama perencanaan tanggap darurat. 	Masyarakat dan LSM menyampaikan komentar selama proses konsultasi bahwa kegagalan tailing dapat memiliki dampak ekonomi yang parah pada petani, nelayan, dan bisnis lokal di hilir. Seluruh pemangku kepentingan yang terkena dampak harus dimasukkan dalam proses perencanaan tanggap darurat.
14. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk pembahasan untuk menetapkan bahwa pengelola tambang harus menanggung keseluruhan biaya ganti rugi, remediasi dan reklamasi. Juga menambahkan bahwa cakupan kriteria harus ditentukan melalui proses partisipatif yang bergantung pada persetujuan masyarakat, produsen dan bisnis yang terkena dampak, dan tersedia untuk umum. 	Masyarakat yang terkena dampak kegagalan bendungan tailing, terutama di Brasil, telah mendokumentasikan bagaimana pengelola tambang berusaha membatasi cakupan kompensasi terkait kegagalan bendungan tailing. Pemangku kepentingan yang terkena dampak harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan untuk ganti rugi, remediasi dan reklamasi setelah kegagalan.
	<ul style="list-style-type: none"> Termasuk pembahasan untuk mengklarifikasi bahwa kriteria ganti rugi harus dilakukan pembaruan berkala, termasuk jika terjadi kegagalan. 	Versi pertama Safety First hanya menetapkan bahwa kriteria ganti rugi harus dikembangkan sebelum kegagalan, dan pembahasan yang diperbarui menjelaskan bahwa penentuan kriteria harus menjadi proses yang berkelanjutan.
	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan pembahasan untuk mengakui sifat traumatis dari latihan tanggap darurat dan kebutuhan untuk mengatasi potensi dampak dari latihan ini. 	Komunitas yang tinggal di "Zonas de Auto-Salvamento" (Zona Penyelamatan Diri) di Brasil mengatakan bahwa latihan darurat dapat menyebabkan kecemasan di komunitas hilir atau membangkitkan ingatan akan tragedi masa lalu.
	<ul style="list-style-type: none"> Lebih lanjut ditentukan jenis bangunan dan fasilitas (yaitu : rumah sakit, penjara, fasilitas tempat tinggal yang dibantu) yang tidak boleh berada di zona penyelamatan diri karena tantangan evakuasi yang ada. 	Melindungi populasi yang rentan (yaitu: orang cacat, orang tua, orang yang dipenjara) yang mungkin kesulitan untuk mengungsi tanpa bantuan profesional.

Bagian / Panduan	Perubahan dari versi sebelumnya	Alasan
<p>15. Informasi mengenai keselamatan tambang harus tersedia untuk umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan persyaratan bahwa nama, kepemilikan, lokasi yang tepat, jejak kaki dan ketinggian semua fasilitas pembuangan tailing harus tersedia untuk umum. Memasukkan pembahasan yang mengharuskan pengelola tambang untuk mengungkapkan tanggal, lokasi, jumlah tailing yang dilepaskan dan dampak pada area sekitar dari kegagalan tailing. Menambahkan informasi tentang tanggung jawab pemerintah dan pembuat peraturan untuk mengungkapkan informasi. 	<p>Saat ini, informasi dasar terkait bendungan tailing belum tersedia untuk publik. Beberapa pengelola tambang telah mengungkapkan informasi di Portal Tailing Global tetapi banyak perusahaan yang belum.</p> <p>Masyarakat dan LSM seringkali tidak sadar ketika ada kejadian pelepasan tailing dari fasilitas pembuangan. Pengelola tambang harus secara proaktif mengungkapkan informasi ini, yang penting untuk keselamatan masyarakat.</p> <p>Pengelola tambang bukan satu-satunya yang tidak mengungkapkan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk menilai keamanan fasilitas pembuangan tailing. Selama proses konsultasi, ada kritik dari masyarakat dan LSM bahwa pembuat peraturan tidak memberikan informasi kepada masyarakat.</p>
<p>16. Pastikan ketersediaan akses untuk mendapatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ini adalah panduan baru yang membahas hak masyarakat yang terkena dampak untuk mengakses bantuan teknis independen di berbagai fase kehidupan tambang. Mewajibkan bahwa para ahli harus dipilih oleh masyarakat yang terkena dampak, bantuan teknis harus ditawarkan dari tahap awal eksplorasi hingga penutupan, harus didanai oleh pengelola tambang, dan harus ditawarkan jika masyarakat terkena dampak kegagalan bendungan tailing atau untuk pengadu selama prosedur pengaduan. 	<p>Selama lokakarya komunitas Safety First, banyak peserta menyatakan perlunya akses ke ahli teknis independen untuk dapat menganalisis dan memahami informasi yang diberikan oleh perusahaan pengoperasi, dan memiliki pijakan yang lebih setara dengan perusahaan pengoperasi selama proses konsultasi atau negosiasi. Hal ini menjadi perhatian utama bagi anggota masyarakat yang berkonsultasi karena kurangnya kepercayaan pada perwakilan pengelola tambang dan badan pengatur.</p> <p>Memberikan panduan tentang bagaimana membuat para ahli bertanggung jawab kepada masyarakat dan menetapkan sejumlah skenario berbeda di mana anggota masyarakat mungkin memerlukan akses ke bantuan teknis.</p>
<p>17. Pertanggungjawaban atas risiko, meminimalkan konsekuensi dari kegagalan, mencegah terjadinya kegagalan, dan konsekuensi dari kegagalan harus berada utamanya di tangan Dewan Direksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menambahkan bahwa Dewan Direksi harus menandatangani setiap risiko keselamatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia atau kerusakan lingkungan yang parah, dan bahwa mereka harus menjamin pertimbangan keselamatan tidak dikorbankan hanya demi produksi. Menambahkan setidaknya satu anggota Direksi harus memiliki keahlian di bidang fasilitas tailing dan pengelolaannya. 	<p>Lebih lanjut memastikan bahwa Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menjamin keamanan fasilitas tailing dan untuk memastikan bahwa keselamatan tidak dikorbankan hanya demi memangkas biaya.</p> <p>Memastikan bahwa Direksi memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengevaluasi keputusan yang dibuat terkait fasilitas tailing dan pengelolaannya.</p>